

ARAH DAN TATANAN POLITIK GLOBAL PASCA COVID 19

Tirta N. Mursitama

Guru Besar Universitas Bina Nusantara (Binus) Jakarta

Abstrak

Artikel ini membahas tentang arah dan tatanan politik global pasca Covid 19. Dunia menghadapi ketidakpastian masa depan akibat persebaran virus corona (Covid-19) yang telah mengancam keamanan transnasional dan meruntuhkan sistem keuangan global. Setelah sejumlah negara mengambil kebijakan lockdown dan penerbitan larangan perjalanan lintas negara, fondasi ekonomi dunia juga mulai terdampak cukup serius hingga berpotensi memunculkan resesi global. Akibatnya, negara-negara dipaksa oleh keadaan untuk mampu memenuhi kebutuhan internalnya dan mengurangi level ketergantungan terhadap pasokan logistik dari negara lain (self-sufficiency). Covid 19 Menguji negara siapa yang siap dan siapa yang tidak siap saat kemunculan virus covid 19. Kemunculan China dan menguatnya Kerjasama di lingkup regional ASEAN menjadi fenomena yang bisa dilihat pasca Covid 19.

Kata Kunci: Covid 19, politik global, keamanan transnasional

A. Pendahuluan

Setelah perang dunia kedua berakhir, segera negara-negara pemenang perang menyusun tatanan dunia yang baru. Mengikuti kemudian lahirnya lembaga-lembaga seperti PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa), World Bank, IMF (*International Monetary Bank*) dan termasuk lahirnya GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*). (Fairman, 2012). Orde baru dunia dengan agenda liberalisasi mulai berlangsung dan dijalankan secara sistematis sejak saat itu. Menghindari terjadinya perang massal secara terbuka seperti perang dunia kedua menjadi alasan dibangunnya tatanan dunia yang baru. Tatanan yang didasarkan pada kekuatan kapital dan dibangun secara sistematis dan global. Pertentangan segera muncul tidak lama setelah masa pembentukan tatanan dunia baru tersebut. Situasi berkembang dengan menguatnya Blok Barat dan Blok Timur. Ketegangan politik terjadi berbasis pertarungan liberalisasi pasar melawan pasar yang terkontrol menjadi dua kutub yang menguat. ‘Perang dingin’ selama kurang lebih 40 tahun baru mereda setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1988. Perubahan ini membuka seluas-luasnya kesempatan bagi rejim pasar bebas menyusun infrastruktur ekonomi neo liberal secara global (Buzan, 1998)

Mengikuti terbentuknya organisasi keuangan internasional, tahun 1947 lahir sebuah kesepakatan pembebasan tarif terhadap barang-barang perdagangan atau dikenal dengan GATT. GATT terus berjalan dan berkembang, negara yang terlibat perlahan namun terus bertambah. Perluasan anggota dan konsekuensi perdagangannya membuat pengaruh GATT

menjadi semakin luas dan mendalam secara global. Melalui Putaran Uruguay yang dimulai tahun 1986, GATT akhirnya resmi menjadi WTO (*World Trade Organization*) dengan pemberlakuan aturan perdagangan pada Januari 1995. Organisasi yang saat berdiri terdiri dari 123 negara ini bertujuan utama melakukan liberalisasi perdagangan dunia. Sejak Putaran Uruguay, persoalan yang diatur tidak lagi hanya sebatas penurunan tarif atas barang perdagangan, tetapi semakin meluas pada persoalan jasa dan kekayaan intelektual. (Davies, 2019). Realitas ekonomi-politik global seperti ini akan mendorong terbentuknya karakter politik internasional yang lebih bersifat state-centric, nasionalistik, dan proteksionis, yang cenderung melemahkan dalil dan postulat tradisi globalis dan multilateralis. Kecenderungan ini bukanlah hal baru, mengingat politik internasional yang bercorak realis ini sudah mulai menguat sejak satu dekade terakhir sejak "watak politik populis" mulai bermunculan di sejumlah negara besar. Namun, tragedi pandemi korona ini akan mendorong lebih kuat terbentuknya karakter realis dalam politik internasional mutakhir.

B. Arah dan Tatanan Global

Penanganan virus corona membutuhkan kepemimpinan yang efektif, tegas, dan cermat, dalam mengendalikan dan memobilisasi semua kerja serta upaya lintas sektoral secara harmoni. Dengan manajemen kepemimpinan yang efektif, langkah-langkah yang ditempuh bisa semakin efektif untuk membatasi ruang gerak dan persebaran virus, meminimalisasi tingkat kematian (mortality rate) dan meningkatkan potensi sembuh dan percepatan recovery bagi pasien yang telah terdiagnosis positif terinfeksi.

Dengan kata lain, efektivitas penanganan virus korona di sejumlah negara akan menjadi pertarungan besar bagi kredibilitas dan legitimasi pemerintahan yang ada di masing-masing negara. Pada saat yang sama, pandemi virus yang memiliki tingkat persebaran secara cepat ini juga mampu menelanjangi kapasitas pemerintahan dan fondasi ekonomi negara yang sesungguhnya. Jika ada suatu negara yang selama ini mengklaim diri sebagai negara besar dan kuat (*big and strong state*), tapi tidak mampu menahan laju penyebaran dan angka kematian yang ditimbulkan oleh virus corona, sejatinya negara-negara itu sedang menelanjangi diri untuk menunjukkan kualitas pertahanan internal masing-masing.

Karena itu, pemerintah China dan Partai Komunis Tiongkok dalam nota diplomatiknya yang dikirim ke sejumlah negara-negara mitra menyatakan bahwa kemampuan menanggulangi krisis di Provinsi Hubei dan Kota Wuhan secara cepat berkat kepemimpinan efektif Presiden Xi Jinping yang dijalankan dalam sistem komunis yang diklaim lebih memudahkan proses

koordinasi dan mobilisasi logistik di tingkat strategis ataupun praktis. Tersirat, kerja keras Beijing telah menghasilkan ledakan kepercayaan diri yang cukup besar di internal masyarakat dan para pendukungnya. Bahkan Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyatakan, keberhasilan yang dicapai pemerintahan Xi Jinping bukan hanya menyelamatkan rakyat China, tetapi juga masyarakat dunia.

Jadi, Beijing menyatakan siap bekerja sama dengan semua pihak untuk menanggulangi pandemi yang sangat meresahkan keamanan global ini. Artinya, pada level ini China mulai mendapatkan hasil panen dukungan, simpati, dan pengakuan global, terhadap efektivitas pemerintahannya. Situasi ini menempatkan Amerika Serikat yang selama ini menjadi kawan sekaligus seteru lama China, menghadapi tantangan legitimasi yang sangat besar di mata internasional. Agar tidak kehilangan muka, sedari awal Presiden Donald Trump mengklaim bahwa perkembangan virus corona di Amerika masih bisa dikendalikan dengan baik. Bahkan Trump mengajak warganya untuk berbondong-bondong membeli saham korporasi global yang saat ini tengah jatuh untuk mendapatkan keuntungan besar tahun depan. Namun, saat data persebaran corona di Amerika mulai menguat, pemerintahan Trump mulai gagap menghadapinya. Saat ini, setidaknya sudah ada 68.572 orang yang dinyatakan positif virus corona di Amerika dan sekitar 1.031 orang dinyatakan meninggal akibat keganasan virus ini. Jika tidak tertangani dengan baik, posisi Amerika bisa menyusul daftar panjang negara-negara besar yang gagap dan kelimpungan menghadapi korona. Sejauh ini, posisi teratas jumlah kasus infeksi virus corona masih ditempati China dengan 81.869 kasus, dengan jumlah korban meninggal mencapai 3.287 orang. Sementara Italia berada di peringkat kedua dengan 69.176 kasus terinfeksi dan jumlah korban meninggal mencapai 6.820 orang. (Duerte, 2021). Memang tidak mudah membatasi ruang gerak 327 juta warga Amerika yang terbiasa dengan kebebasan. Namun, selama ini Amerika dikenal sebagai "tanah yang diberkati" dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang paling mapan di dunia. Semua ini adalah pertaruhan besar bagi kredibilitas pemerintahan dan kapasitas negara dalam menghadapi situasi krisis kesehatan global ini. Di Amerika, penanganan terhadap korona akan menjadi pertaruhan besar dalam politik nasional dan Pilpres di tingkat federal pada November 2020 mendatang. Semua bergantung efektivitas kepemimpinan Trump dan kualitas koordinasi antara pemerintahan federal dan negara bagian di Amerika. Corona adalah ujian nyata bagi efektivitas kepemimpinan politik dalam suatu negara. Jika Trump tidak mampu memenangkan hati dan pikiran rakyatnya, babak baru sejarah dan arah pengaruh Amerika terhadap dunia akan mengalami perubahan signifikan.

C. Respon ASEAN Terhadap Covid 19

Pandemi COVID-19 ini juga menunjukkan bahwa tidak ada negara yang dapat menangani pandemi sendirian. Kerja sama internasional sangat dibutuhkan bagi negara mana pun untuk melawan virus mematikan ini. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga tidak luput dari serangan virus COVID-19 ini. Wabah penyakit ini telah menjadi salah satu ancaman keamanan non-tradisional yang signifikan di wilayah Asia Tenggara. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara dengan segera merespon adanya COVID-19 ini dengan memutuskan sikap dan kebijakan domestik masing-masing negara. Kebijakan yang diambil setiap negara berbeda-beda, beberapa negara ada yang lebih memilih kebijakan *lockdown* seperti yang dilakukan oleh Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Ada juga negara lain yang lebih memilih kebijakan *social distancing* seperti yang dilakukan oleh Indonesia. ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) sebagai lembaga regional di Asia Tenggara berusaha bersama melawan COVID-19 yang hingga kini belum bisa diatasi.

Seluruh negara anggota ASEAN menunjukkan kekhawatiran dengan penyebaran virus yang sudah mengakibatkan perekonomian negara anggota ASEAN terpuruk. Untuk itu, ASEAN mengambil tindakan dengan mengajukan kerja sama regional dalam upaya mengatasi pandemi COVID-19 ini. Para pemimpin ASEAN telah membuat rencana dan berdiskusi mengenai sejumlah kebijakan yang menjadi bagian dalam kerja sama regional ASEAN. Terdapat sejumlah kebijakan yang disepakati bersama seluruh anggota ASEAN dan diharapkan kebijakan tersebut dapat membantu sesama anggota melawan virus COVID-19. Akan tetapi terdapat sejumlah kritik dan tantangan kerja sama regional ASEAN dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. (Jha, 2020)

Pada 14 April 2020, Kepala Negara/Pemerintah negara-negara anggota ASEAN mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) khusus ASEAN tentang COVID-19 yang dilakukan melalui video daring. KTT tersebut dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, dalam kapasitasnya sebagai Ketua ASEAN tahun ini (Declaration ASEAN 2020). KTT ini dilakukan secara virtual oleh seluruh anggota ASEAN, mengingat harus diterapkannya *social distancing* dan selain itu para pemimpin negara ASEAN tidak dapat bertemu langsung dalam pertemuan KTT ini demi menghindari penyebaran virus COVID-19 di antara para pemimpin negara. Selanjutnya pada hari yang sama juga diadakan KTT ASEAN *Plus Three* (APT) yang juga diadakan secara virtual, dan diikuti oleh ketiga negara mitra yaitu, Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Hasil dari pertemuan virtual ini adalah

komitmen untuk mengatasi wabah dan mempersiapkan pemulihan pasca-wabah baik secara sosial maupun ekonomi.

Dalam internal ASEAN sendiri, kesepuluh anggota menyepakati beberapa poin penting mengenai penanganan COVID-19, yaitu memperkuat kerja sama melawan COVID-19 dengan saling bertukar informasi, *best practice*, pengembangan riset, pengembangan epidemiologi, dan lain-lain. Selanjutnya, memberikan perlindungan bagi warga negara ASEAN di tengah masa pandemi COVID-19, memperkuat komunikasi publik dan upaya untuk memerangi stigmatisasi dan diskriminasi, berkomitmen untuk mengambil aksi kolektif dan kebijakan terkoordinasi untuk memitigasi dampak ekonomi dan sosial, pentingnya pendekatan komprehensif yang melibatkan *multi-stakeholders* dan *multi-sectorals*, menugaskan para menteri ekonomi ASEAN untuk memastikan berjalannya *supply chain connectivity* sehingga perdagangan dapat terus berjalan, serta mendukung realokasi *Trust Fund* ASEAN guna menanggulangi pandemi virus COVID-19 (Kompas 2020).

Para pemimpin negara ASEAN juga memutuskan membentuk dana regional untuk menanggapi pandemi COVID-19. Pembentukan dana respon (*Respond Fund*) ini bertujuan mengamankan ketersediaan pasokan medis dan peralatan penting di kawasan ASEAN. Dana itu berasal dari realokasi dana yang tersedia dan keuangan yang ada. Dukungan dari mitra ASEAN, seperti ASEAN *Plus Three*, turut membantu pendanaan ini. Dana ini juga disertai dengan komitmen untuk menahan diri dari pengeluaran dana yang tidak perlu pada aliran barang, terutama barang strategis untuk memerangi COVID-19 seperti medis, makanan, dan persediaan yang esensial (Declaration ASEAN 2020).

D. Problem Negara Berkembang

Negara-negara besar dengan kapasitas yang memadai dalam teknologi, tenaga medis, dan fasilitas kesehatan publiknya akan lebih mudah memenangkan perang melawan corona. Namun, bagi negara-negara miskin dan berkembang, corona berpotensi menghadirkan kompleksitas masalah kesehatan yang bisa merembet pada hancurnya pertahanan, keamanan, ekonomi, dan politiknya, sehingga memunculkan hadirnya peluang negara-negara gagal (*failed states*). Negara-negara yang selama ini mengalami instabilitas keamanan, seperti Irak, Lebanon, Palestina, Yaman, Syiria, hingga perbatasan Turki, akan mengalami kesulitan mendapatkan akses kesehatan yang layak di tengah konflik yang tidak berkesudahan. Demikian pula dengan warga di Afghanistan, meskipun perjanjian damai dan gencatan senjata telah ditandatangani

antara pemerintah Amerika dan Taliban, tetapi sejumlah pertempuran kecil masih sering terjadi di sana-sini.

Hal itu mengindikasikan betapa rapuhnya fondasi perdamaian yang ada. Di tengah ketidakpastian situasi ini, akses kesehatan publik akan semakin susah dan tidak mudah mengendalikan persebaran virus ketika konflik dan perang tidak dihentikan. Alhasil, di tengah situasi chaos seperti ini, negara-negara miskin dan berkembang lagi-lagi akan kembali menjadi "medan pertempuran" dan perebutan pengaruh ekonomi-politik bagi negara-negara besar. Secara general, sistem politik internasional yang bercorak multipolar akan bertahan, mengingat adanya wilayah-wilayah seperti Eropa dan Federasi Rusia yang memiliki kekuatan ekonomi-politik yang relatif otonom. Namun, di belahan dunia lainnya seperti Asia Tenggara, Pasifik Selatan, Afrika, Asia Selatan, Amerika Latin, hingga Timur Tengah, kekuatan Amerika Serikat dan China tetap akan menjadi dua kiblat yang menjadi kutub kekuatan ekonomi-politik dunia selanjutnya.

Kondisi dunia di tengah pandemi COVID-19 ini memberikan tantangan bagi banyak negara berkembang yang harus membangun ketahanan kesehatannya ditengah melesunya roda perekonomian mereka, baik dalam bidang jasa layanan kesehatan, ataupun infrastruktur medis. Sehingga berkoalisi akan menjadi satu pilihan yang paling rasional bagi negara untuk dilakukan (Fairman dkk, 2012), meskipun demikian mengedepankan kepentingan nasional menjadi satu hal yang bersifat mutlak bagi setiap negara yang masuk dalam putaran diplomasi kesehatan. Kelompok negara barat pun mengedepankan sikap state centric yang kental ditengan situasi pandemi ini, mereka pun kerap merangkul media dan organisasi internasional untuk melakukan gerakan solidaritas yang bersifat memojokan Cina yang dianggap sebagai musuh bersama saat ini. Meskipun demikian fragmentasi hubungan diplomatik diantara negara-negara barat pun terjadi, solidaritas menjadi domain bagi sebagian negara maju (Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Perancis beserta sekutunya di Asia) untuk memperkuat posisi mereka sebagai hegemon dari pihak lain. Sementara itu kekuatan Cina dan Rusia, serta aliansinya semakin terlihat jelas. Eksekusi politik luar negeri Cina melalui One Belt, One Road (OBOR) semakin intensif. Pada awal merebaknya pandemi COVID-19, citra Cina melemah karena dianggap sebagai sumber bencana dunia ini, namun seiring dengan waktu ia mulai menunjukkan itikadnya dengan menawarkan mekanisme bantuan kesehatan ke banyak negara termasuk Eropa. Selain itu Cina intensitas dukungannya terhadap negara yang sedang berkonflik, terutama negara yang menjadi musuh bagi barat dan aliansinya. Salah satu contohnya, yakni Cina saat ini memberikan dukungan kapasitas militer Pakistan sebagai bentuk responnya atas konflik perbatasan dengan

India. Politik kesetimbangan pun ditempuh India dengan melakukan propaganda politik lewat Indic belt-nya. India menyuarakan suara kelompok negara yang dianggap telah mengalami kerugian akibat eksistensi OBOR – Cina, ditambah dengan isu pandemi dijadikan sebagai rujukan kuat untuk semakin memojokan Cina. Indonesia sendiri sebagai salah satu negara kuat di kawasan menunjukkan sikap yang cenderung imparsial terhadap Cina ataupun pihak barat. Hal ini dilakukan Indonesia untuk semakin memperteguh posisinya sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif. Sebagai satu-satunya negara di kawasan yang menjadi anggota tetap pada forum G20, pilihan Indonesia merupakan hasil kalkulasi rasionalitas agar terobosan penyelesaian pandemi COVID-19 segera terwujud. Posisi Indonesia yang dinilai ambigu ini justru menimbulkan polemik domestik di dalam negara. Sikap Indonesia yang terbuka terhadap kerjasama dengan banyak negara, termasuk intensitas kerjasamanya dengan Cina yang cukup erat telah banyak menuai kritik dari berbagai kalangan, baik itu dari domestik atau pun internasional. Kritik yang kerap diberikan adalah bahwa hubungan bilateral antara Cina dan Indonesia, dinilai tidak seimbang.

'Ketegangan baru dari persaingan lama' ini terus disemai. Amerika yang belum terbukti mampu menjinakkan korona secara efektif, tetap menggunakan narasi "virus dari China" untuk memulai "permainan saling menyalahkan" untuk memojokkan China dalam politik internasional (global blame game). Pada saat yang sama, masyarakat di akar rumput kini juga mulai banyak mengonsumsi materi-materi bernada konspiratif yang seolah logis terkait spekulasi korona sebagai senjata biologis, yang mudah ditebak arah logikanya untuk melemahkan salah satu pihak di antara keduanya. Narasi semacam ini tampak efektif membangkitkan sentimen anti-China (Anti-Chinese sentiment) yang telah berurat akar di sejumlah negara-negara berkembang yang selama ini menjadi wilayah perebutan pengaruh antara paham liberalisme dan komunisme saat Perang Dunia II hingga Perang Dingin berlangsung. Hal itu dikonfirmasi oleh banyaknya penolakan hingga vandalisme terhadap warga China di sejumlah negara, seperti di Jepang, Korea Selatan, termasuk kejadian di Kendari, Indonesia, beberapa waktu lalu. Mengantisipasi potensi hadirnya politik internasional yang tidak sehat ini (toxic), negara-negara berkembang termasuk Indonesia, harus mampu bergerak secara efektif untuk memastikan kekuatan besar dunia lebih peka terhadap kesehatan, keselamatan, dan keamanan dunia (global security). Arogansi negara-negara besar harus diredam untuk memastikan langkah-langkah diplomasi, kerja sama dan upaya-upaya multilateral terhadap setiap ancaman tradisional ataupun non-tradisional seperti corona ini

dapat ditanggulangi. Keselamatan dunia merupakan tanggung jawab bersama, apa pun ideologi, cara pandang, agama, dan identitasnya.

Pandemi COVID 19 memberikan sebuah gambaran akan pentingnya menginfiltrasikan isu kesehatan dalam kebijakan luar negeri, seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Mengingat implikasi kesehatan terhadap sektorsektor vital negara, seperti ekonomi sampai dengan pertahanan. Ketika isu kesehatan telah tercakup dalam prioritas kebijakan luar negeri, maka negara mempunyai kesiapan yang terkait dengan mitigasi bencana wabah atau pandemi ketika terjadi (Kickbusch dkk, 2013). Selain itu pandemi ini menyebabkan pergeseran dalam konstelasi politik internasional, eksistensi selatan-selatan semakin intensif, dimana negara rising power dianggap lebih bisa diandalkan untuk menjadi mitra dalam menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk isu kesehatana (Kickbusch dkk, 2013). Terlebih dengan dunia saat ini yang mengalami polarisasi kekuatan politik, hal itulah yang menstimulasi intensitas aliansi selatan-selatan semakin kokoh, dimana terdapat Brazil dan Afrika Selatan, serta aliansi negara yang berlandaskan ideologi yang sama, seperti Cina, Kuba, Rusia. Forum selatan-selatan dianggap mampu menyuarakan kepentingan negara berkembang secara lebih proporsional, ketimbang dengan forum utara-selatan (Kickbusch, dkk, 2013). Pergeseran inilah yang akan membuat dunia harus melakukan banyak penyesuaian tidak hanya yang bersifat kenegaraan, sampai dengan setiap individu harus mampu untuk dapat mengakomodir perubahan kehidupan pasca pandemi.

E. KESIMPULAN

De-globalisasi menjadi suatu hal yang saat ini dihadapi oleh banyak negara, ketika dunia berhadapan dengan ancaman pandemi COVID-19. Hal itu menyebabkan pergeseran tatanan global, terutama yang terkait dengan pemetaan kekuatan politik internasional. Kelompok negara maju yang berada di bagian utara dunia, harus menghadapi kenyataan bahwa mereka harus mempersiapkan diri untuk melakukan penyesuaian pasca pandemi. Terlebih eksistensi forum Selatan-Selatan semakin jelas dengan dukungan negara besar, seperti Cina dan Rusia, yang selama ini kerap berseberangan dengan kelompok negara utara. Selain itu, pandemic COVID-19 semakin mengukuhkan justifikasi bahwa isu kesehatan tidak dapat dinafikan dari komponen esensial dalam setiap kebijakan luar negeri.

Referensi

- Buzan, Barry, Ole Waever, Jaap de Wilde. *Security: A New Framework for Analysis*. United States of America: Lynne Rienner Publisher Inc., 1998
- Davies, Sara E. *Containing Contagion: The Politics of Disease Outbreak in Southeast Asia*. United States of America: John Hopkins University Press, 2019
- Duarte, Fernando. *Diplomasi Virus Corona: Bagaimana Covid-19 Memicu Ketegangan Internasional Karena Pil, Masker, dan Berbagai Macam Tuduhan*. 2020. Diunduh melalui <https://www.bbc.com/indonesia/dunia/52240043>, tanggal 20 Juli 2021
- Fairman, David, Diana Chigas, dkk. *Negotiating Public Health in A Globalized World: Global Health Diplomacy in Action*. New York: Springer, 2012
- Jha, Gautam Kumar. *Pandemi: Penyebab dan Otot Kekuatan Besar*. 2020. Diunduh melalui: <https://liputan4.com/pandemi-penyebab-dan-otot-kekuatan-besar> diakses pada 29 Juni 2021
- Jha, Gautam Kumar. *A Multilateral Global Order Need of The hour*. 2020. Diunduh melalui <https://www.dailypioneer.com/2020/columnist/a-multilateral-globalorder-need-of-the-hour.html> diakses 30 Juni 2021
- Kickbusch, Ilona, Graham Lister, dkk. *Global Health Diplomacy: Concepts, Issues, Actors, Fora, and Cases*. New York: Springer, 2013
- Kurnia, Tommy. *Donald Trump Stop Dana Untuk WHO, Keputusan Berbahaya Saat Pandemi Corona?*. 2020. Diunduh melalui <https://www.liputan6.com/global/read/4229179/headline-donald-trump-setopdana-untuk-who-keputusan-berbahaya-saat-pandemi-corona> diakses pada tanggal 23 Juli 2021
- Mintz, Alex, Karl DeRouen Jr. *Understanding Foreign Policy Decision Making*. New York: Cambridge University Press, 2010
- “*Declaration of the Special ASEAN Summit on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*,” <https://asean.org/declaration-special-asean-summit-coronavirus-disease-2019-COVID-19/>. Diakses 15 Juli 2021.
- Riyanti Djalante, Laely Nurhidayah, Jonatan Lassa, Hoang Van Minh, Yodi Mahendradhata, Nguyen Thi Ngoc Phuong, Angelo Paolo L Trias, Michelle Ann Miller, Susanti Djalante, Muhammad Sabaruddin Sinapoy. “*The ASEAN’s responses to COVID-19: A policy sciences analysis*”. 2020. file:///C:/Users/user/Downloads/TheASEANCOVID_May3_FINAL.pdf. Diakses <https://www.kompas.com> 22 juli 2021
- Kompas. “*7 Poin Penting KTT ASEAN Khusus COVID-19 yang diikuti Presiden Jokowi*”. Kompas, 14 April 2020. <https://www.kompas.tv/article/76101/presiden-jokowi-ikuti-ktt-asean-khusus-dan-asean-plus-three-COVID-19-berikut-hasil-pentingnya>. Diakses 22 Juli 2021